



DPPKAD Gelar Rekonsiliasi Data Aset Daerah

PUTUSSIBAU—Dinas Penda-
patan Pengeluaran Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD), Selasa
(24/6) hingga Kamis (26/6) meng-
gelar rekonsiliasi data aset tetap
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu tahun 2014. Acara tersebut
dibuka dan dihadiri Sekda Kapuas
Hulu Ir.H.M.Sukri dan diikuti selu-
ruh SKPD mulai tingkat kabupaten
hingga kecamatan untuk mengin-
ventaris seluruh aset tetap daerah
hingga ke desa.

Salah satu aset daerah yang
banyak disoroti oleh peserta re-
konsiliasi adalah aset daerah di
tingkat kecamatan, terutama aset
berupa tanah. Yang telah diban-
gun kantor camat, kantor UPT
dinas dan rumah dinas guru. "Aset
berupa tanah memang banyak
bermasalah di daerah kecamatan.

Terutama tanah yang sebelumnya
sudah diserahkan pemilikanya, ke-
mudian ditarik kembali oleh ahli
warisnya setelah beberapa tahun
kemudian," tutur Drs H.M. Zaini
MM, kepala DPPKAD Kapuas Hulu
kemarin.

Dengan adanya kegiatan rekon-
siliasi ini diharapkan bisa meng-
gali lebih jauh mengenai aset dan
masalah yang dihadapi, baik di
tingkat kabupaten maupun ting-
kat kecamatan dan desa. Karena
peserta yang hadir menyampai
permasalahan dan jumlah aset yang
ada di daerahnya masing-masing.
Dengan demikian bisa mem-
permudah DPPKAD melakukan
pendataan aset tetap milik pemer-
intah Kabupaten Kapuas hulu, dan
masing-masing SKPD baik tingkat
kabupaten maupun UPT menyam-

paikan persoalan yang dihadapi.
"Yang mengemuka dalam per-
temuan pertama adalah aset tanah
yang diserahkan pemilikinya tanpa
disertai dokumen-dokumen yang
sah. Sehingga ketika tanah tersebut
tidak digunakan para ahli warisnya
menuntut dan menguasai kembali
tanah tersebut. Karena sebagian
besar aset daerah berupa tanah
di kecamatan belum memiliki
sertifikat dan akan dibenahi se-
cara perlahan. Dukungan seluruh
stakeholder, mulai dari tingkat
kabupaten hingga kecamatan da-
lam pendataan aset milik daerah
sangatlah penting.

Lebih lanjut mantan camat
Bunut Hilir ini mengatakan, DP-
PKAD akan berusaha mengesjar
opini WTP, untuk itu sangat
diharapkan dukungan camat,

kepala puskesmas, KUPT Dinas
Pendidikan serta SKPD lainnya.
Sehingga temuan BPK masih
adanya aset daerah yang bernilai
satu atau nol kedepan sudah pu-
nya nilai. "Kedepan kami ingin
berusaha menyelesaikan temuan
BPK terkait nilai aset satu atau
nol, sehingga bernilai. Terutama
untuk aset tetap berupa tanah
paling tidak akan dibuat SPPT,"
jelas Zaini.

Sementara itu Sekda Kapuas
Hulu Ir.H.M.Sukri meminta kepada
seluruh SKPD, baik di tingkat kabu-
paten maupun tingkat kecamatan,
bahkan desa melalui cabang atau
UPT dinas, jika ada persoalan
terkait aset milik daerah segera
melaporkan ke kabupaten. "Aset
tetap berupa tanah memang ban-
yak bermasalah, karena puluhan

tahun lalu penyerahan tanah oleh
pemiliknya kepada pemerintah
memang tidak disertai dengan

dokumen berupa SKT maupun
surat hibah dan masalah ini harus
diselesaikan," jelasnya. (aan)

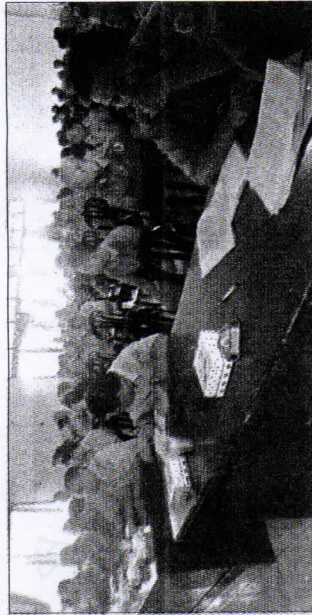


FOTO MUSTAFA PONTIANAK POST
SERIOUS: Peserta kegiatan rekonsiliasi data aset tetap Pemerintah Kabu-
paten Kapuas Hulu tahun 2014 serius mendengarkan pengarahan dari Sekda
Kapuas Hulu H.M.Sukri dan Kepala DPPKAD H.M.Zaini di gedung SKB.